

MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Y. Setyohadi Pratomo dan M. Daenie

- 1) Dosen FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : (setyohadi_1505@untag.ac.id)
- 2) Dosen FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : (m-daenie@untag.ac.id)

Abstrak

Kota Semarang dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 1,6 juta jiwa memerlukan bahan pangan beragam untuk memenuhi kebutuhan yang tetap dan supply bahan pangan dari kabupaten sekitar terbatas. Kota Semarang bukan penghasil bahan pangan dengan rata-rata produksi hanya memenuhi 12-15% kebutuhan terutama beras, telur, ikan dan sayur mayur serta umbi-umbian. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan mengatasi kerentanan pangan bagi kelompok miskin dan rentan serta pemenuhan gizi bagi Balita dan penduduk lanjut usia. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan menjadi langkah strategis bagi pembangunan pangan di Kota Semarang. Kebijakan ini memerlukan dukungan dan langkah bergerak bersama pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan konsumsi pangan secara efisien (pangan cerdas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang yang baru.

Kata kunci : ketahanan pangan, pangan beragam, kelompok miskin dan rentan.

Abstract

The City of Semarang with a large population of 1.6 million people requires a variety of foodstuffs to meet constant needs and the supply of food from surrounding regencies is limited. The city of Semarang is not a food producer with an average production of only 12-15% of the needs, especially rice, eggs, fish and vegetables and tubers. The purpose of this study is to analyze policies to increase food security and overcome food vulnerability for the poor and vulnerable groups as well as fulfill nutrition for children under five and the elderly population. The policy of increasing food security is a strategic step for food development in the city of Semarang. This policy requires support and steps to move with development stakeholders as stated in the policy of efficient food consumption (smart food) in the new Semarang City Medium Term Development Plan.

Keywords: food security, diverse food, poor and vulnerable groups

A. Pendahuluan

Kota Semarang bukanlah daerah produsen bahan pangan yang surplus (hasil padi, jagung dan umbi-umbian serta hasil perikanan hanya memenuhi 10 – 15% kebutuhan masyarakat) sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pangan harus mendapatkan pasokan beragam bahan pangan dari Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan dan sekitarnya yang merupakan penghasil beras, sayur mayur, telur, daging dan buah-buahan serta ikan. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk sebanyak 1,86 juta jiwa yang tersebar di 16

kecamatan dan 177 kelurahan dengan strata sosial yang beragam, perlu ketersediaan pangan secara tetap, variasi bahan pangan beragam, sedangkan supply pangan berkala semakin terbatas dan harganya semakin mahal (disebabkan berkurangnya lahan pertanian, anomali musim yang berdampak pada usaha pertanian dan kegagalan panen) mengakibatkan supply semakin berkurang.

Sebagai salah satu pusat perdagangan pangan nasional Kota Semarang berperan strategis bagi peningkatan ketahanan pangan, pusat perdagangan dan distribusi bahan pangan serta sentra industri pengolahan pangan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Arah kebijakan Pangan

dan Gizi agar dapat sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan implementasi kebijakan ketahanan pangan dan peningkatan capaian kinerja lima (5) pilar ketahanan pangan terkait dengan penanganan gizi buruk/kurang, stunting, pemenuhan pangan kelompok miskin dan rentan. Hal lain yang dihadapi masyarakat perkotaan adalah gizi lebih dan obesitas yang berdampak pada penyakit degeneratif (Purwanto, 2019).

Kebijakan pengembangan ketahanan pangan erat kaitannya dengan kesejahteraan, pemenuhan hak masyarakat yang tentunya memerlukan dukungan segenap pihak untuk “Bergerak Bersama Membangun Semarang”. Sistem logistik pangan Kota Semarang menyangkut aspek ketersediaan pangan secara berlapis, yaitu ketersediaan pangan tingkat daerah, ketersediaan pangan di tingkat pedagang dan ketersediaan pangan di rumah tangga. Penting pula memperhatikan kemudahan akses pangan dan distribusi pangan (melalui pasar tradisional, toko/warung dan toko modern) dan variasi pemanfaatan pangan beragam (termasuk menurunkan konsumsi beras rata-rata 90 – 95Kg/ kapitan per tahun) dan meningkatkan konsumsi protein dan ikan) dan belum optimalnya pengawasan dan keamanan pangan beredar masih terdapat bahan tambahan pangan, pewarna dan garam tidak beryodium (Purwanto, 2019). Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Semarang (2019) dari Dinas Ketahanan Pangan diketahui dari 177 kelurahan tidak terdapat kelurahan yang rentan pangan dan mengalami kesulitan pangan, karena ketersediaan dan distribusi pangan baik dan akses masyarakat terhadap bahan pangan relatif mudah. Namun demikian masih terdapat lebih kurang sebanyak 4,9% penduduk yang termasuk rumah tangga miskin dan rentan, kelompok masyarakat dengan pemenuhan bahan pangan pokok menjadi beban pengeluaran pangan antara 56 - 63% dari belanja rumah tangga per bulan yang perlu mendapat perhatian.

B. Kerangka Kebijakan Ketahanan dan Pemenuhan Pangan

1. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan Sustainable development Goal's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /TPB) Tahun 2026 – 2030

Komitmen global dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada SDGs/TPB juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya *The World Health*

Assembly pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*). Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan *wasting* pada balita kurang dari 5 persen.

Pemenuhan pangan dan gizi pada masyarakat merupakan salah satu komitmen di dokumen Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan Pangan dan Gizi terdapat dalam Tujuan 2 SDGs atau TPB yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, terutama dalam pencapaian target tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup; segala bentuk kekurangan gizi, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup; menangani stunting dan *wasting* pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua; meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

2. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Perencanaan Nasional

Keterkaitan antara pangan dan gizi dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah Peningkatan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang

menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pemenuhan pangan tersebut bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Impor pangan merupakan upaya terakhir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apabila kebutuhan pangan tersebut benar-benar tidak dapat dipenuhi dari kedua sumber pangan nasional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 disebutkan Peningkatan Kedaulatan Pangan menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan ke depan. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, dengan kebijakan :

- a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri;
- b. Kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan
- c. Melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani, buruh tani dan nelayan.

Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Kebijakan ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata

baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional.

Kerangka intervensi peningkatan ketahanan pangan dan gizi terkait dengan menangani gizi buruk, gizi kurang dan *stunting* oleh Kementerian Kesehatan. terbagi menjadi dua langkah strategis yaitu : (1) Intervensi Gizi Spesifik dan (2) Intervensi Gizi Sensitif. Intervensi Gizi Spesifik. Kegiatan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan inisiatif pelaksana di daerah. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi Gizi Sensitif. Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga Pusat dan daerah. Kedua kerangka intervensi *stunting* diatas menjadi kegiatan prioritas dalam mencegah *stunting* dan gizi buruk. Persandingan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 1. Intervensi Program Nasional Dalam Penanganan Ketahanan Pangan dan Masalah Gizi

No	Intervensi	Program Intervensi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
1	Intervensi Gizi Spesifik dan Program	<ol style="list-style-type: none"> a. Kesehatan remaja dan gizi ibu pra-hamil; b. PMT ibu Hamil; c. Suplementasi /fortifikasi gizi mikro; d. Pemberian ASI dan makanan pendamping ASI; e. PMT anak; f. Penganekaragaman makanan; g. Perilaku pemberian makan dan stimulasi; h. Penanggulangan gizi buruk; i. Manajemen dan pencegahan penyakit; j. Intervensi gizi dalam kedaruratan (termasuk dampak pandemi Covid 19).
2	Intervensi Gizi Sensitif dan Pendekatannya	<ol style="list-style-type: none"> a. Pertanian dan peningkatan ketahanan pangan; b. Jaminan Sosial Nasional (JSN); c. Perkembangan anak usia dini;

No	Intervensi	Program Intervensi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Pendidikan formal dan pendidikan vokasi; f. Pemenuhan sanitasi dan air bersih; g. Pelayanan kesehatan dan KB. h. Peningkatan ketahanan keluarga.
3	Membangun Lingkungan yang Memungkinkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara tepat tentang capaian RAD PG; b. Strategi advokasi bagi kelompok sasaran; c. Koordinasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah secara sinergis; d. Akuntabilitas, regulasi insentif dan peraturan perundangan; e. Peningkatan kapasitas aparat pelaksana; f. Mobilisasi sumberdaya potensi lokal; g. Komitmen Pimpinan Daerah dan penganggaran melalui APBD; h. Penggalangan Pogram CSR; i. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga kelitbang.

Sumebr : Bappenas, 2019.

Upaya yang dilaksanakan terkait pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan lima (5) strategi utama yang saling kait mengkait, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri;
- b. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan;
- c. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat;
- d. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan;
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3. Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Kota Semarang

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari Visi dan Misi

pembangunan jangka menengah daerah yaitu : "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika". Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan dalam rumusan lima (5) misi. Misi yang erat kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan dan gizi adalah misi ke 2 yaitu : Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdayasaing dan stimulasi pembangunan industrim berdasarkan riswt dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila dan misi ke 3 yaitu : Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan dan Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.

Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan ketahanan pangan berdasarkan rencana aksi daerah pangan dan gizi Kota Semarang yang telah disusun Bappede Kota Semarang, dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator dan Sasaran Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian 2026*)	Instansi/OPD/ Urusan
1	Produksi padi	ton	35.366 (2019)	35.366	Dinas Pertanian

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian 2026*)	Instansi/OPD/ Urusan
2	Produksi jagung	ton	4.500	4.500	Dinas Pertanian
3	Produksi daging sapi/ kerbau	ton	2.424,4	2.424,4	Dinas Pertanian
4	Produksi daging ayam buras	ton	1.021	1.320	Dinas Pertanian
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	kawasan	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
6	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kelompok	50	55	Dinas Ketahanan Pangan
7	Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah	ton	80,93	85,00	Dinas Ketahanan Pangan
8	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	lumbung	16	16	Dinas Ketahanan Pangan
9	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terfasilitasi	kawasan	17	17	Dinas Ketahanan Pangan
10	Konsumsi kalori mencapai kkal/kapita/hari	(kkal/kap/hari)	1.912,3	2.150	Dinas Ketahanan Pangan
11	Konsumsi Protein/Kap/hr	gram	61,4	57,1	Dinas Ketahanan Pangan
12	Skor PPH	skor	88,7	93	Dinas Ketahanan Pangan
13	Konsumsi energi	(Kkal/Kp/hari)	1.912,3	2.150,0	Dinas Ketahanan Pangan
14	Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional	Kg/Kap/Tahun	40,16	40,21	Dinas Perikanan
15	Produksi Perikanan Tangkap	ton	3.200	3.300	Dinas Perikanan
16	Produksi Perikanan Budidaya	ton	2.456	2.470	Dinas Perikanan

Sumber data : Data Ranwal RPJMD Kota Semarang 2020 (diolah)

C. Analisis Pembahasan dan Hasil

1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU Pangan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, disebutkan Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi dari tingkat negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (PP No 17 Tahun 2015).

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.310 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Aspek ketersediaan dapat dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja tetapi juga dari perdagangan antar daerah maupun impor dari luar negeri. Namun demikian akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek ketersediaan pangan dari impor. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan

sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit sehingga masyarakat mengalami kekurangan pangan.

Sedangkan kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang bersangkutan karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Perempuan/Ibu RT menjadi pengambil keputusan tentang menu makanan dan kunci bagi keluarga mengkonsumsi pangan beragam, pangan segar dan beragam.

Faktor-faktor secara langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi yang saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi *malnutrition*, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan *malnutrition*. Secara skematis dapat dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 1 : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecukupan Pangan

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Kota Semarang diidentifikasi masalah pangan dan gizi berdasarkan pengelompokan lima (5) pilar pembangunan ketahanan pangan, sebagai berikut :

No	Pilar	Permasalahan	Perangkat Daerah Terlibat
1	Pilar I Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih ditemukannya gizi buruk, kasus stunting dan gizi lebih. 2) Pemahaman ibu hamil masih kurang dalam penyediaan makanan bergizi dan pemeriksaan kehamilan 3) Belum optimalnya pemantauan tumbuh kembang anak 4) Masih kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan persalinan (kualitas bidan dan sarpras puskesmas polindes, poskedes dan pustu). 5) Masih belum optimalnya cakupan bayi ASI Eksklusif 6) Belum optimalnya peran Posyandu dalam 	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kementerian Agama

No	Pilar	Permasalahan	Perangkat Daerah Terlibat
		<p>melakukan pemantauan tumbuh kembang balita</p> <p>7) Belum optimalnya pembinaan kantin sekolah menuju sekolah sehat</p>	
2	Pilar II Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam	<p>1) Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian beragam, penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan pemanfaatan pekarangan melalui kelompok tani, Gapoktan dan KWT.</p> <p>2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan.</p> <p>3) Ketersediaan pangan Kota Semarang sangat tergantung pada daerah sekitarnya.</p> <p>4) Berkurangnya lahan pertanian berkelanjutan disebabkan alih fungsi lahan di perkotaan.</p> <p>5) Belum optimalnya produksi dan pengolahan hasil perikanan, baik hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap.</p>	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum
3	Pilar III Mutu dan Keamanan Pangan	<p>1) Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.</p> <p>2) Belum semua industri dan pengolahan pangan memiliki ijin yang dikeluarkan Dinas Kesehatan.</p> <p>3) Belum optimalnya pengawasan bahan pangan yang beredar dan kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya bahan pangan yang sehat.</p>	Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan
3	Pilar IV – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<p>1) Belum semua rumah tangga yang ber PHBS.</p> <p>2) Masih belum semua kelurahan STBM</p> <p>3) Masih ditemukannya kasus penyakit karena PHBS yang kurang (TBC, diare, DBD)</p> <p>4) Belum semua rumah tangga memiliki akses air minum/bersih dan sanitasi layak</p>	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Agama.
5	Pilar V- Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi	<p>1) Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan (DKP).</p> <p>2) Belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanganan gizi dan pangan</p> <p>3) Belum optimalnya peran dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan dan peningkatan pangan dan gizi.</p>	Bappeda dan Sekretariat Daerah

Sumber : Rekap hasil FGD Bappeda Kota Semarang (2019)

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu unsur dari ketahanan pangan. Menurut Sawit dan

Ariani (2014) bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang

terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Sedangkan menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh bahan pangan. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran pangan menurut Hukum Working 1943 menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan

pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.

Secara Kota Semarang memiliki cakupan konsumsi kalori yang baik dalam mencapai angka target konsumsi diatas 1.400 kkal/kapita/hari. Intervensi dalam memenuhi ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi dengan arahan kebijakan, sebagai berikut :

No	Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil yang Diharapkan
1	Meningkatkan produksi pangan alternatif	Menyediakan bahan pangan beragam dan merubah pola pangan selain beras, perubahan ini sangat sulit dan perlu edukasi/ KIE.
2	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan	Menanam dalam pot dan menyediakan alternative bahan pangan, sayur dna buah.
3	Menjamin distribusi pangan	Memperluas akses pangan masyarakat, pasar, warung, toko modern.
4	Menjaga keamanan pangan	Menumbuhkan kesadaran kritis pemanfaatan pangan sehat, proses produksi bersih dan pemahaman konsumen tentang pangan yang baik.
5	Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak	Kesadaran masyarakat tentang gizi, pemahanan tentang makanan jadi dan kandungan gizi. Sifat kritis pangan beredar.
6	Meningkatkan kualitas ketersediaan asupan gizi pada kantin sekolah	Kesadaran tentang pangan segar, pangan beragam dan makanan beredar sejak anak sekolah. Sekolah mengawasi dan orang tua di rumah mendidik pula.

Sumber : RAD PG Kota semarang (2019)

Berdasarkan pendekatan multi disiplin perlunya kebersamaan langkah melaksanakan peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka menjamin

ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan bahan pangan di Kota Semarang dengan semangat bergerak bersama dan melangkah bersama, sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Peranserta Pemenuhan Pangan dan Gizi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/ evaluasi kebijakan ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan pangan serta keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen bersifat kritis terhadap konsumsi dan pangan beredar.
2	Dinas Kesehatan	Perijinan dan pengawasan pangan beredar serta pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil pengolah pangan. Proses produksi bersih dan tempat umum hiegienis (Pujasera, Pasar Sehat dan ljin edar pangan).
3	Dinas Pertanian;	Pangan segar dan proses produksi serta pengolahan pasca panen yang baik (pengawasan penggunaan bibit, proses panen dan pemanfaatan pestisida. Proses pengolahan pangan secara ASUH dan halal.
4	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan variasi bahan pangan beragam, konsumsi pangan segar dan beragam
5	Dinas Perikanan;	Meningkatkan produksi ikan budidaya, kampanye garmarikan dan meningkatkan konsumsi ikan, serta proses produksi secara ASUH.

No	Perangkat Daerah	Peranserta Pemenuhan Pangan dan Gizi
6	Dinas Pendidikan;	Pengenalan sejak dini tentang pangan segar dan variasi pangan sehat, kantin sehat di PAUD, SD dan SLTP serta sarana Pendidikan lainnya.
7	Dinas Perdagangan;	Pengawasan pangan beredar dan pengamanan stok bahan pangan, terutama pada bulan Romadhon, Hari Raya dan tahun baru. OPD bekerjasama dengan Dolog dan dunia usaha menyelenggarakan operasi pasar (OP) secara berkala.
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kampanye dan menggerakkan kaum perempuan/ ibu RT dan keluarga dalam rangka peningkatan gizi dan pangan dan konsumsi pangan yang baik.
10	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Kampanye dan pembelajaran hal baik dalam pemanfaatan bahan pangan, B2SA dan pangan lokal.

Perlunya dukungan pihak lain yaitu instansi vertikal yang mengelola pendidikan formal dan non formal adalah Kementerian Agama dan pengawasan pangan olahan, pangan beredar yaitu :

No	Instansi Vertikal	Peranserta Pemenuhan Pangan dan Gizi
1	Kementerian Agama;	Pengenalan sejak dini tentang pangan segar dan variasi pangan sehat, kantin sehat di sekolah PAUD, SD, SMP dan pondok pesantren.
2	Balai POM Kementerian Kesehatan.	Pengawasan pangan beredar dan kadaluwarsa. Kampanye tentang pangan sehat dan halal.

Dengan demikian diketahui bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan gizi pemerintah Kota Semarang memerlukan partisipasi masyarakat konsumen. Sangat penting terutama kesadaran masyarakat dalam melindungi diri, menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi aman dan layak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan tentang pangan yaitu : layak dikonsumsi, aman bagi kesehatan dan halal

2. Peran Serta Kalangan Non Pemerintah

Pendekatan penta helix dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan kalangan non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani

lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi. Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang sebagai regulator dan fasilitator agar terjamin keberlanjutannya dalam pengembangan program dan swadaya masyarakat agar ketahanan pangan masyarakat semakin baik. Dengan meningkatkan peran-peran dari enam pihak dalam pengembangan ketahanan pangan sebagai berikut :

- a. Dunia usaha dunia industri (DUDI) dilaksanakan melalui Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) digunakan untuk memberikan tambahan makanan bagi gizi balita dan ibu hamil, peningkatan kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), peningkatan ketrampilan pemanfaatan pekarangan, penguatan kemandirian pangan, selain itu juga dapat melakukan investasi Kota Semarang terkait dengan pengolahan makanan
- b. Peran perguruan tinggi/akademisi adalah berperan serta melalui penelitian, program pengabdian pada masyarakat (PPM), laboratorium sosial dan desa/kelurahan mitra yang melibatkan baik dosen maupun mahasiswa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, perbaikan gizi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pangan dan gizi serta kesehatan umum lainnya.
- c. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilakukan melalui pendampingan masyarakat untuk pemberdayaan dan swadaya masyarakat, baik tentang PHBS, perbaikan gizi dan penguatan kemandirian pangan dalam masyarakat, pemasyarakatan piring makanku dan lain-lain.

- d. Peran Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan organisasi profesi lainnya dapat meningkatkan kesadaran, ketrampilan dan swadaya masyarakat dalam penyediaan gizi berimbang dan Gernas.
- e. Media Massa memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyebarkan informasi dan praktek baik (lesson learn) mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat Kota Semarang.
- f. Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat (antara lain : PKK, Forum Kota Sehat Kota Semarang, FKK, Karang Taruna, Komda Lansia, Forum Posyandu) dapat berperan aktif dalam peningkatan kesadaran dan ketrampilan masyarakat dalam penyediaan gizi berimbang dan ketahanan pangan secara swadaya masyarakat.

3. Mengembangkan Pendanaan Secara Gotong Royong

Dalam era digital maka dapat dimanfaatkan dengan menggalan sumber-sumber pendanaan secara saweran (crowd funding) dari kalangan dunia usaha. Pelunya membangun pendanaan program pangan dan gizi secara gotong royong dimana alokasi pendanaan dari Pemerintah Kota Semarang, dana kelurahan dan atau Dana CSR dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), mitra pembangunan, dan sumber lain sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelurahan dapat menggunakan dana kelurahan untuk alokasi menurunkan kasus stunting, gizi buruk/ gizi kurang pada Balita. Kegiatan yang didanai adalah pemberian makanan tambahan, pembangunan MCK, perbaikan sumber air bersih/minum. Hal lain yang penting adalah kampanye hidup sehat, pelatihan ketrampilan pemanfaatan pekarangan, PHBS, pengelolaan sampah dengan metode 3R, dan pelatihan usaha ekonomi produktif di rumah tangga miskin melalui (UP2K) agar RT miskin mengenal perintisan usaha dan pangan sehat, pangan beragam berbasis potensi lokal.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka dapat dikemukakan kesimpulan berdasarkan

hasil penelitian tentang kebijakan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam penyelesaian permasalahan pangan dengan pendekatan multisektoral dengan semangat “Bergerak Bersama Membangun Semarang Semakin Hebat” sesuai arahan kebijakan pembangunan daerah yang baru. Dalam tahap-tahap penyusunan laporan selanjutnya, kami memerlukan dukungan dan kerjasama dengan segenap perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan lima pilar ketahanan pangan dan gizi meliputi : (1) Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat; (2) Pilar 2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam; (3) Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan; (4) Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan (5) Pilar 5 Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.
2. Kebijakan tentang ketahanan pangan di Kota Semarang merupakan langkah strategis dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kemanfaatan bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok penduduk secara terus menerus. Sedangkan supply bahan pangan terbatas dari kabupaten sekitar. Kota Semarang salah satu kota yang menghasilkan bahan pangan (lebih kurang memenuhi 15% dari kebutuhan penduduk sebanyak 1,6 juta jiwa) dan potensi pangan lokal. Kota Semarang menggalang potensi dalam ketersediaan bahan pangan berlapis melalui cadangan pangan pemerintah (dikelola Bulog), cadangan pangan di pasaran dan cadangan pangan rumah tangga.
3. Kebijakan ketahanan pangan di Kota Semarang adalah upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok (beras), bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kelompok masyarakat miskin/rentan yang perlu mendapatkan fasilitasi perangkat daerah maupun kelompok menengah yang memerlukan beragam bahan pangan sejalan dengan “perubahan gaya hidup” masyarakat perkotaan.
4. Pembangunan ketahanan pangan di Kota Semarang memerlukan “Gerak Bersama Segenap Pemangku Kepentingan” secara inovatif dan berkelanjutan. Motor penggerak adalah perangkat daerah Kota Semarang, dengan melibatkan Lembaga perguruan tinggi/ lembaga swadaya masyarakat dan kalangan dunia usaha serta partisipasi masyarakat terkait erat

dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan sebagaimana arahan lima pilar tersebut.

5. Peningkatan ketahanan pangan memerlukan pengembangan inovasi cerdas, terutama akses ketersediaan dan distribusi pangan (sislogda), keamanan dan sanitasi pangan (penjaminan mutu pangan), pola konsumsi dan asupan pangan (perubahan perilaku dan budaya konsumsi pangan), pemanfaatan dan inovasi pangan lokal (keragaman pangan) dan tata kelola limbah pangan (yang kemudian bermanfaat secara sosial dan nilai ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Arif, Sirajudin dkk, Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. Informasi Terkini 2019- 2020. Penerbit : WFP dan Smeru, Jakarta, 2020.
- Bappeda Kota Semarang, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang, Penerbit : Bappeda Kota Semarang, 2019.
- BPS dan Bappeda, Kota Semarang Dalam Angka 2019. Penerbit : Bappeda Kota Semarang, 2020.
- BPS dan Bappeda, Kota Semarang Dalam Angka 2020. Penerbit : Bappeda Kota Semarang, 2021.
- Dinas Ketahanan Pangan, Pemetaan Ketersediaan dan Kerentanan Pangan Kota Semarang, Penerbit : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2018
- Purwanto, Rahmad, Kajian tentang Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Lumbung Pangan, Laporan penelitian (tidak diterbitkan), FISIP UNTAG Semarang, 2018.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Penerbit : Setneg RI, Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit : Setneg RI, Jakarta, 2014